

PENGARUH TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT DAN TRANSPARANSI TERHADAP TINGKAT KORUPSI

Siti Triya Setia Ningsih, Haryanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone : +622476486851

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of audit finding, audit opinion and transparency on the corruption. In this study the dependent variable consisting of Corruption. The independent variable in this study is audit finding, audit opinion and transparency. This research was conducted with secondary data, namely multiple linear regression analysis. The data collection sourced from BPK related to IHPS and LHP LKPD. High Court related to data of criminal acts of corruption and local government website related to transparency data. The results showed that audit findings, audit opinion and transparency have no effect on the level of corruption in both districts and cities in Central Java Provinces.

Keyword: Audit Findings, Audit Opinion, Transparency, Corruption.

PENDAHULUAN

Korupsi harus diberantas, selain merugikan banyak pihak korupsi juga merupakan tindakan memikirkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Isu mengenai korupsi merupakan isu yang selalu ramai diperbincangkan di masyarakat luas, salah satunya Indonesia. Indonesia termasuk jajaran negara yang memiliki angka korupsi yang tinggi dalam survey yang dilakukan Lembaga Pemantau indeks korupsi global, *Transparency International* (2020) dalam 'Global Corruption Barometer Asia'. Indonesia juga berada di urutan 62 dari 126 negara terkorup di dunia yang memiliki nilai 0,52 poin (ICW, 2019).

Dalam data *Transparency International* (2016) mengenai peringkat *Corruptino Peerception Index* (CPI) 2015, Indonesia merupakan peringkat 88 dengan nilai 36 dari 168 negara. Nilai ini berada di angka 0 hingga 100, dimana 0 yang berarti tingkat korupsi masih tinggi dan 100 artinya bebas dari korupsi. Sebelumnya yaitu 2014, Indonesia berada pada peringkat 107 memiliki nilai 34. Pernyataan tersebut mengindikasikan meningkatnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Di ASEAN, Indonesia dikalahkan oleh Singapura dengan nilai 85, Malaysia dengan nilai 50, dan Negara Thailand dengan nilai 38. Nilai indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sebesar 40, di Asia dengan nilai 43. (*Transparency International*, 2016).

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberantas korupsi dilakukan dengan berbagai kebijakan, salah satunya yaitu dengan cara membentuk Badan Institusi Pemeriksa dalam rangka melakukan pencegahan untuk meminimalkan penyalahgunaan penggunaan barang milik negara. Fungsi pemeriksaan ditindaklanjuti melalui proses audit yang memiliki peran penting untuk menginformasikan dan menyelidiki penyelewengan seperti pengeluaran harta milik negara yang berlebih dan hilang (Olken, 2007).

Menurut BPKP (1999) Salah satu penyebab korupsi di Indonesia yang tinggi terlihat dalam skor penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di tahun 2020 yang telah dikeluarkan *Transparency International* (TI). Korupsi juga dapat terjadi karena adanya faktor keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*Expose*). Keserakahan merupakan potensi yang dimiliki setiap individu dan berkaitan dengan pelaku korupsi. Organisasi, badan atau masyarakat luas dalam situasi tertentu membuka kesempatan dalam tindakan kecurangan.

Banyaknya tindak korupsi yang terjadi kini menjadi penyebab kepercayaan masyarakat yang berkurang terhadap kinerja pemerintah. Masalah korupsi menjadi tantangan yang serius bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah, Secara tidak langsung korupsi juga merusak kepercayaan

¹ Corresponding author

masyarakat. Kasus korupsi di pemerintahan daerah yang meningkat, terjadi atas dasar perbedaan atau ketidaksesuaian regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dalam perkembangan di pemerintahan Indonesia mengenai kuatnya tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan di instansi pemerintahan, di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tuntutan meliputi keharusan dilaksanakan transparansi kepada masyarakat luas atas dasar kewajiban dalam memenuhi tuntutan (Mustofa, 2012).

Akuntabilitas pemerintah yang dianggap kurang karena pemerintah daerah belum sepenuhnya menyediakan akses mengenai kasus korupsi dan informasi yang sesuai dan dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan, termasuk masyarakat, akibatnya dapat menurunkan kualitas dalam laporan keuangan. Harapan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel menciptakan suatu sistem pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan pemerintah daerah sebagai suatu entitas yang bertugas melakukan pengelolaan dan memiliki tanggung jawab atas penggunaan aset daerah. Akuntabilitas pada instansi-instansi di pemerintahan, memiliki makna yaitu pengelolaan pemerintah daerah erat kaitannya dengan teori keagenan (Mardiasmo, 2009).

Akan ada *information asymmetry* antara pemerintah dengan masyarakat, yang akan menyebabkan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, guna menghindari kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah, pelaksanaan pemerintah daerah harus transparan juga dibutuhkan sistem pengendalian yang baik menurut teori keagenan. Jika pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan dengan transparan, tindak penyelewengan atau korupsi di pemerintah daerah semakin berkurang.

LKPD memberikan gambaran mengenai tingkat transparansi di pemerintah daerah saat ini memiliki peran penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah, sehingga untuk mengetahuinya menjadi keharusan laporan keuangan harus diaudit dan dikerjakan oleh BPK RI. Laporan tersebut seperti opini, dalam opini auditor memiliki 4 jenis opini. Jika opini auditor Wajar Tanpa Pengecualian, mengindikasikan transparansi pemerintah daerah yang semakin membaik serta diharapkan mampu mengatasi kasus korupsi dengan baik. Sedangkan apabila Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar dan Tidak Menyatakan Pendapat masih terdapat salah saji material, Akibatnya masih terdapat tindakan korupsi. Akan tetapi untuk mengetahui penilaian kinerja pemerintah daerah, juga bisa dilihat dari kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan Pemerintah dan pengeluaran daerah, sehingga dapat terlihat tingkat aktivitas, pertumbuhan daerah dan tingkat kemandirian suatu pemerintah daerah.

Sejak tahun 2005, survey yang dilakukan oleh Lembaga Transparansi Indonesia pada 2005, terkait dengan kasus korupsi, bahwa hasil korupsi di negara ini hasilnya bersifat subyektif, dan definisi korupsi berbeda-beda di tiap wilayah. Seharusnya hasil survey harus dapat dimengerti secara khusus sebagai suatu ukuran publik, bukan hanya satu ukuran yang obyektif. Korupsi harus dimaknai secara luas, yaitu penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan sendiri.

BPK memiliki tugas untuk turut serta dalam pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan juga tanggung jawab keuangan Negara dalam pemerintahan. Tingkat akuntabilitas dapat ditunjukkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang merupakan salah satu hasil audit oleh BPK, di dalamnya memuat opini audit. Upaya yang digunakan pemerintah dalam rangka mengatasi kasus korupsi menjadi faktor penentu keberhasilan penanganan tingkat korupsi di Negeri ini. Upaya mengatasi kasus korupsi erat kaitannya dengan lembaga pemeriksa. Lembaga tersebut memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan barang milik negara yang tidak efisien. Upaya mengatasi kasus korupsi erat kaitannya dengan lembaga berwenang dalam rangka pencegahan penyalahgunaan barang milik negara yang tidak efisien (Dwiputrianti, 2008).

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberantas korupsi dilakukan dengan berbagai kebijakan, salah satunya yaitu dengan cara membentuk Badan Institusi Pemeriksa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan barang milik negara. Pemeriksaan juga dilakukan menggunakan audit, yaitu membantu mengeluarkan informasi juga melakukan deteksi penyelewengan seperti barang hilang (Olken, 2007). Meningkatkan sistem pengawasan serta pemeriksaan di lingkungan pemerintah sangat penting untuk dilakukan. Seperti dalam sistem pemeriksaan dimana dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran audit. Proses audit internal dan eksternal membantu memberikan informasi dan melakukan deteksi penyelewengan dan kasus yang terjadi (Kaufmann et al., 2011). Audit merupakan bentuk wewenang auditor dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan perusahaan yang baik dan sesuai. Keyakinan publik pada perusahaan tergantung pada validasi oleh auditor ahli dan independen (Alvin A. Arens et al., 2011). Dengan adanya audit yang dilakukan dalam lingkungan pemerintah nantinya akan mempermudah dalam mengungkap indikasi kecurangan yang terjadi.

Dengan adanya perubahan fungsi yang terjadi sekitar tahun 1990 an telah terjadi adanya perubahan dalam hal tata kelola publik, pendanaan dan akuntabilitas yang erat hubungannya dengan kasus korupsi, termasuk di dalamnya hubungan dalam pelaksanaan audit di Pemerintahan Indonesia.

Mengenai peraturan di Indonesia, dimana adanya temuan audit yang dijadikan sebagai hasil evaluasi auditor eksternal (Badan pemeriksa Keuangan/BPK) terhadap kondisi pengelolaan keuangan, kualitas pengendalian internal dan kepatuhan pemerintah terhadap keuangan daerah. Auditor memiliki peran penting untuk dapat melakukan deteksi kecurangan. Dalam memeriksa laporan keuangan agar bebas darisalah saji merupakan tugas dari seorang auditor (Mulyadi, 2013).

Penelitian mengenai hasil audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi oleh Damiani dan Liska (2017) membuktikan bahwa temuan audit dan opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi, sedangkan tindak lanjut hasil audit memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat korupsi. Berbeda dengan penelitian Masyitoh et al (2015) dimana ukuran tingkat korupsi, pada penelitian sebelumnya menggunakan indeks persepsi korupsi. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya dan beberapa fenomena korupsi yang terjadi, penulis tertarik untuk menguji “Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit dan Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi Di Jawa Tengah”.

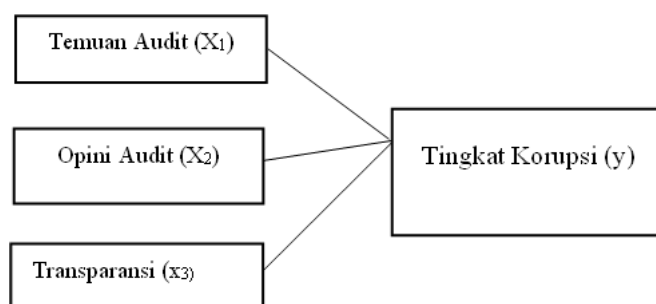
KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Landasan Teori

Teori keagenan menuurt Jensen dan Mekling (1976) didefinisikan sebagai teori yang muncul ketika kegiatan bisnis yang tidak secara langsung dikelola oleh pemilik entitas namun diserahkan kepada agen. Teori keagenan dikaitkan dengan asimetris informasi (*information assimetry theory*) ketika terdapat kecurangan antara agen kepada prinsipal. Teori keagenan penting sejalan dengan pertumbuhan pasar modal dunia, dimana agen yang dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan keuangan, yang digambarkan pada Laporan Realisasi Anggaran dan perolehan opini WTP atas Laporan Keuangan yang telah diaudit. Diperlukan kerjasama oleh agen dan prinsipal untuk menjalankan masing-masing fungsinya dengan baik. Dalam teori keagenan menyebutkan bahwa pemerintah sebagai agen mendapat pengawasan oleh DPRD, prinsipal memiliki tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja agen (Jensen dan Mekling, 1976).

Penelitian Terdahulu

Menurut Penelitian Husna et al., (2017) menunjukkan bahwa opini audit dan temuan audit tidak berpengaruh simultan terhadap tingkat korupsi, sedangkan penelitian Saraswati dan Triyanto (2022) mengatakan bahwa temuan audit, transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah. Penelitian Azhar dan Setyaningrum (2015) menyebutkan bahwa temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi, sedangkan tindak lanjut berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Sedangkan, menurut penelitian Masyitoh et al., (2015) menunjukkan opini audit memiliki pengaruh negatif terhadap indeks persepsi korupsi.



Perumusan Hipotesis

Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi

Menurut Huefner (2011) dalam penelitiannya menyebutkan temuan audit atas sistem pengendalian internal berfungsi sebagai pendeteksi kasus kecurangan di pemerintah daerah. Dalam website mengatakan bahwa BPK memiliki kontribusi dalam mengungkap adanya kasus korupsi, namun jika dalam pemeriksaan nditemukan adanya kecurangan, BPK tidak mempunyai hak dalam menindaklanjutinya. Jika pelanggaran terjadi, BPK melaporkan pelanggaran kepada Komisi Pemberantasa Korupsi (BPK RI, 2020).

Selain itu Utami (2020) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan berpengaruh negatif pada jumlah korupsi. Tingginya jumlah temuan audit dan ketidakpatuhan peraturan menunjukkan kasus korupsi yang semakin rendah.

Berdasar pada hasil penelitian di atas, hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H1: Temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

Pengaruh Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi

Penelitian Heriningsih (2015) berhasil menguji pengaruh opini audit, kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi membuktikan bahwa opini audit tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat korupsi di Jawa. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa sekalipun opini audit memperoleh opini WTP dari BPK RI, namun masih ada kemungkinan terjadinya korupsi, seperti yang dikatakan Ketua KPK Abraham Samad (2013) bahwa banyak lembaga yang bersembunyi di balik opini WTP. Hal ini juga sering dijadikan alasan oleh para oknum untuk menghindari pemeriksaan. Hasil pengujian membuktikan bahwa daeah yang memperoleh opini WTP atau bukan dari BPK tidak memiliki perbedaan, tingkat korupsi dan opini yang dikeluarkan dari BPK tidak memiliki pengaruh. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Heriningsih (2015).

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis kedua adalah:

H2 = Opini audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

Pengaruh Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi

Menurut penelitian Saraswati dan Triyatno (2020), menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi secara parsial, hal ini mengandung makna bahwa tingkat transparansi yang tinggi tidak menjamin rendahnya korupsi yang terjadi. Dengan tingkat transparansi yang rendah juga tidak dapat dikatakan bahwa kasus korupsi tersebut tinggi.

Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis yang diambil adalah:

H3 = Transparansi berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian berlangsung di BPK Jateng dan Kejaksaan Tinggi Jateng, dan Website pada 35 instansi dengan 29 pemerintah kabupaten dan 6 pemerintah kota dan 1 pemerintah daerah. Untuk proses pengambilan data dilakukan pada bulan April 2022 dan pengolahan data dimulai dengan memasukkan variabel penelitian ke program SPSS.

Definisi Operasional Variabel

1. Temuan Audit

Menurut BPK RI, 2020, ada dua jenis temuan audit, yaitu temuan atas sistem pengendalian internal (SPI) dan temuan atas ketidakpatuhan perundang-undangan. Temuan audit yang digunakan diukur menggunakan total jumlah temuan pemeriksaan BPK RI dari temuan atas sistem pengendalian internal dan temuan atas ketidak patuhan perundnag-undangan.

Temuan = Total temuan SPI + kepatuhan perundang-undangan.

2. Opini Audit

Menurut (Ardiyos, 2007), opini audit adalah laporan yang dikeluarkan oleh akuntan publik yang terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran dari suatu laporan keuangan. Opini audit yang digunakan berupa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan opini selain itu.

Untuk opini WTP mendapatkan poin 1, dan selain WTP mendapat 0.

3. Transparansi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, transparansi diartikan sebagai pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat.

Menurut Erlanda dan Khairudin (2016) lima indikator yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran transparansi adalah:

- (1) Adanya pengumuman kebijakan anggaran;
- (2) Adanya dokumen anggaran dan dapat diakses dengan mudah;
- (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.;

(4) Usulan rakyat dapat terakomodasi dengan baik;

(5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada masyarakat luas.

Transparansi diukur dengan skala 1 sampai 5. Jika semua indikator terpenuhi, maka pemerintah daerah mendapatkan skor 5, dan seterusnya.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian yakni pemerintah daerah di Jawa Tengah tahun 2016-2020 sejumlah 35 instansi. Yaitu 6 pemerintah kota, serta 29 pemerintah kabupaten.

Sampel diambil menggunakan non probability sampling, yakni metode purposive sampling sehingga Pemilihan sampel penelitian berupa Pemerintah Daerah, Kabupaten, Kota di Jawa Tengah yang telah diperiksa dan terindikasi adanya kasus korupsi menurut data KPK.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari data yang tersedia. Laporan Tahunan Kejaksaan Tinggi digunakan untuk melihat jumlah kasus korupsi. Untuk data temuan audit dan opini menggunakan data yang bersumber dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan, juga LHP LKPD dari BPK Tahun 2016-2020. Sedangkan untuk data transparansi didapat dari website masing-masing instansi.

Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dilakukan dengan pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti juga menggunakan pengambilan data sebagai landasan penelitian sebelumnya untuk memperkuat data penelitian ini.

Metode Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini bertujuan memberikan deskripsi atas data yang telah terkumpul. Penelitian ini menggunakan nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum (*max*), nilai minimum (*min*), dan standar deviasi.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah terdapat distribusi normal pada model regresi dan variabel residual. Uji t dan uji f memberikan asumsi nilai residual akan sesuai dengan distribusi normal (Ghozali, 2016).

2. Uji Multikolinieritas

Tujuan menggunakan uji multikolinieritas untuk melakukan pengujian apakah terdapat kaitan antar variabel independen. Jika hasilnya hubungan variabel independen tidak berkorelasi menunjukkan model regresi yang baik. Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana variabel independen memiliki korelasi satu sama lain.

3. Uji Heterokedastisitas

Tujuan penggunaan uji heterokedastisitas dalam penelitian ini sebagai alat pengujian perbedaan variance dari residual antar penelitian. Apabila nilai variance dari residual satu ke yang lain konstan, merupakan homokedastisitas dan jika tidak sama merupakan heterokedastisitas (Ghozali, 2016).

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji yang dilakukan antar sampel yang didesain berdasarkan waktu dan tempat (*time series*) dan pengujian yang dilakukan menggunakan model uji Durbin Watson (DW).

Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali, 2011 Uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama sama terhadap variabel dependen yang diakibatkan oleh variabel independen. Apabila nilai

signifikansi > 0,05 maka H_0 diterima Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka H_0 ditolak.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi berguna sebagai alat pengukuran kemampuan model untuk memberi penjelasan variabel terikat (Ghozali, 2016). Saat mengukur presentase kontribusi variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat selain itu dipengaruhi oleh faktor lain.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Nilai signifikan penelitian ini 0,05. Prosedur pengujian menggunakan nilai t untuk analisis regresi. Apabila signifikansi uji t adalah > 5% (0,05) maka H_0 diterima berarti bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda bermanfaat mengetahui apakah ada pengaruh variabel bebas yang berpengaruh variabel terikat secara parsial atau bersamaan. Persamaan regresi dengan linier berganda dalam penelitian ini adalah :

$$\text{CORRUP} = \alpha + \beta_1\text{FIND} + \beta_2\text{OPINION} + \beta_3\text{TRANS} + \varepsilon$$

Keterangan:

CORRUP = Tingkat korupsi

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

FIND = Temuan Audit

OPINION = Opini Audit

TRANS = Transparansi

ε = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi objek penelitian

Di bawah ini merupakan gambaran singkat mengenai prosedur pengambilan sampel dengan standar yang telah ditetapkan dengan *metode purposive sampling*.

Tabel 4. 1

Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Keterangan	Total
1	Jumlah Pemda Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah	35
2	(Dikali banyaknya tahun penelitian)	5
3	Sampel awal	175
4	Outlier Pemerintah Kabupaten dan Kota yang memiliki Nilai ekstrem	(47)
5	Sampel akhir	128

sumber: data diolah, 2022

Tabel 4.1 mengemukakan, sampel awal adalah 175. Namun karena data outlier pada saat pengolahan data, maka sampel terakhir yang dipakai dalam riset ini berjumlah 128 instansi.

Analisis data statistik deskriptif

Berikut hasil dari analisis statistik deskriptif penelitian ini :

Tabel 4. 2

Hasil Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Min	Max	Mean	Std.Deviation
FIND	128	3,00	22,00	11,3828	4,59051
OPINION	128	,00	1,00	-	,19450
TRANS	128	1,00	5,00	3,8047	1,06526
CORRUP	128	,00	4,00	1,9219	1,12669
Valid (listwise)	N 128				

sumber : Hasil olah data SPSS 23 2022

Hasil Uji Asumsi Klasik

Berikut beberapa hasil uji asumsi klasik penelitian ini :

Tabel 4. 3

Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik	Uji yang digunakan	Hasil uji	Keputusan
Uji normalitas	Uji K-S	0,197 (> 0,05)	Data berdistribusi normal
Uji multikolinieritas	Tolerance	setiap variabel > 0,1	Data bebas dari multikolinieritas
	VIF	setiap variabel < 10	
Uji heterokedastisitas	Uji glejser	setiap variabel > 0,05	Data bebas dari heterokedastisitas
Uji autokorelasi	Uji Durbin Watson	du < dw < 4-du (1,7596 < 1,826 < 2,2404)	Data bebas dari gejala autokorelasi

Sumber: Data diolah, 2022

Dari tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini layak untuk diuji dan dianalisis lebih lanjut.

Uji simultan (Uji F)

Tabel 4.4
Hasil Uji F

Model	F	Sig.
1 Regression	2,991	,034
Residual		
Total		

Dari tabel 4.4 tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,034 atau lebih kecil dari 0,05 artinya syarat terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen penelitian ini yaitu temuan audit, opini audit dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu tingkat korupsi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.5
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,260	,067	,045

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,045 atau 4,5%. Artinya pengaruh variabel independen yakni temuan audit, opini audit dan transparansi terhadap variabel dependen yakni tingkat korupsi sebesar 4,5 %. Sementara sisanya tergantung variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Uji signifikansi parameter individual (Uji T)

Tabel 4.6
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Model	B	t	Sig
(Constant)	1,551	2,152	,033
FIND	,039	1,751	,082
OPINION	-,623	-1,196	,234
TRANS	,139	1,511	,133

sumber : Data diolah, 2022

Dapat diketahui bahwa variabel temuan audit (FIND), opini audit (OPINION), dan transparansi (TRANS) tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi, karena masing-masing untuk nilai signifikansinya berada di atas 0,05.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	B	t	Sig
(Constant)	1,551	2,152	,033
FIND	,039	1,751	,082
OPINION	-,623	-1,196	,234
TRANS	,139	1,511	,133

Sumber: Data diolah, 2022

Model perhitungan regresi linier berganda menggunakan SPSS 23 adalah sebagai berikut:

$$\text{CORRUP} = \alpha + \beta_1\text{FIND} + \beta_2\text{OPINION} + \beta_3\text{TRANS} + \varepsilon$$

$$\text{CORRUP} = 1,551 + 0,039\text{FIND} + (-0,623)\text{OPINION} + 0,139 \text{TRANS} + \varepsilon$$

PEMBAHASAN

Tabel 4.8
Ringkasan Hasil Pengujian

No.	Hipotesis	Signifikan	Hasil	Ket
1.	Temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi	0,203 (>0,05)	Tidak signifikan	Hasil ditolak
2.	Opini audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi	0,073 (>0,05)	Tidak signifikan	Hasil ditolak
3.	Transparansi berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.	0,365 (>0,05)	Tidak signifikan	Hasil ditolak

sumber : data diolah (2022)

Berikut ini merupakan penjelasan dari tabel 4.8 di atas:

Pengaruh Temuan Audit Terhadap tingkat korupsi

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, diperoleh informasi bahwa koefisien regresi temuan audit sebesar 0.039 memiliki nilai t hitung sebesar 1,751. Variabel temuan audit memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.082. Berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan temuan audit tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi. Penelitian berbeda dengan penelitian Huefner (2011) yang menyebutkan temuan sistem pengendalian internal berguna untuk pendeteksi adanya penyelewengan di pemerintahan.

Pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi

Hasil koefisien regresi adalah -0,623 artinya memiliki hubungan negatif terhadap tingkat korupsi memiliki nilai t hitung -1,196 dan tingkat signifikansi sebesar 0,082. Hasilnya tingkat korupsi tidak dipengaruhi oleh variabel opini audit. Penelitian ini juga membuktikan opini audit WTP yang didapatkan oleh kebanyakan instansi yang dijadikan sampel tetapi masih terdapat kasus korupsi yang tinggi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Husna et al., (2017) bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Pengaruh transparansi terhadap tingkat korupsi

Hasilnya menunjukkan transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi. Yang terlihat dari tingkat signifikansinya sebesar 0.133, dimana nilai tersebut lebih besar

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi, dan hipotesis ke-3 di tolak, karena didukung dengan data dan sesuai penelitian. Ukuran yang digunakan dalam transparansi yaitu melalui kebijakan anggaran dan laporan keuangan sehingga hal ini tidak dapat menjadi tolak ukur seluruh pihak dalam entitas tersebut bersih dari kasus korupsi. Hasil penelitian juga selaras dengan penelitian Saraswati & Triyanto (2020) menunjukkan tidak semua transparansi yang maksimal dapat mengurangi kasus korupsi.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis yang dikerjakan, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mempelajari pengaruh temuan audit, opini audit, dan transparansi terhadap tingkat korupsi. Berikut ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian :

1. Temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.
2. Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.
3. Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.

Keterbatasan

1. Tahun penelitian yang digunakan terlalu singkat.
2. Dalam mengukur tingkat korupsi hanya menggunakan variabel bebas.

Saran

Merujuk keterbatasan yang sudah dipaparkan, penulis menghadirkan saran untuk peneliti selanjutnya :

1. Bagi auditor BPK untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas dan dilakukan perbaikan indikator temuan audit dan opini audit yang dikeluarkan.
2. Bagi pemerintah kabupaten/ kota dan daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam transparansi anggaran agar lebih spesifik.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah objek penelitian dan indikator yang lebih baik.

REFERENSI

- Alfitra, A. (2016). Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi Oleh KPK. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 73–86. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3201>
- Alvin A. Arens, Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2011). *Jasa audit dan assurance :pendekatan terpadu adaptasi Indonesia*. Salemba Empat.
- Ardiyos. (2007). *Kamus Standar Akuntansi*. Citra Harta Prima.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2008). *Auditing Dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi* (12th ed.). Erlangga.
- Arens, A. A., & Loebbecke. (2008). *Auditing Pendekatan Terpadu* (A. A. Yusuf(ed.)). Salemba Empat.
- Asian Development Bank. (2001). Our Framework Policies and Strategies. *Asian Development Bank*, 49. <http://usidc.org/doc/social-protection.pdf>
- Azhar, K., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Korupsi Kementerian / Lembaga di Indonesia. *Departemen Akuntansi, FEB UI*, November.
- Dwiputrianti, S. (2008). Fiskal Dan Akuntabilitas Sektor Publik (2001-2008) Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, V, 397–415.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate: dengan program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gedeona, H. T. (2005). Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi di Tingkat Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2(3), 258–267.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate: dengan program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heriningsih, S. (2015). Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Dan Tingkat Korupsi Dianalisis Dari Opini Auditor. *Univesity Research Colloquium*, 86–95.
- Huefner, R. J. (2011). Fraud Risks in Local Government: An Analysis of Audit Findings. *Journal of Forensic & Investigate Accounting*, 3(3), 111–125.



- Husna, N., Rahayu, S., & Triyanto, D. N. (2017a). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2017). *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 4(1), 20.
- Khairudin, & Erlanda, R. (2016). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Se-Sumatera). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7(2), 1–24.
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 864–874.
- Lane, J. E. (2000). *The Public Sector: Concepts, Models and Approaches*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.4135/9781446220085>
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Marsha Isnadiva, S., & Haryanto. (2021). HASIL PEMERIKSAAN DAN KASUS KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 83–100.
- Mouna, A., Nedra, B., & Khaireddine, M. (2020). International comparative evidence of e-government success and economic growth: technology adoption as an anti-corruption tool. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 14(5), 713–736. <https://doi.org/10.1108/TG-03-2020-0040>.
- Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: Evidence from a field experiment Indonesia. *Journal of Political Economy*, 115(2), 200–249. <https://doi.org/10.1086/517935>
- Pertiwi, A. R., & Haryanto. (2022). Pengaruh Opini Audit , Temuan Audit , Dan Kerugian Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Di Jawa Tengah. 11(2021), 1–8.
- Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 73–90. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i1.4933>.
- Saraswati, S. R., & Triyanto, D. N. (2020). THE EFFECT OF AUDIT FINDINGS, TRANSPARENCY, AND ACCOUNTABILITY ON THE LEVEL OF CORRUPTION (Study on The Government of East Java in 2015-2018). *E-Proceeding of Management*, 7(1), 1000-.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan - Keahlian Buku 2*. Salemba Empat.
- Tobink, R., & Talanky, N. (2005). *Kumpulan Istilah Akuntansi* (2nd ed.). AtalyaRileni Sudeco.
- Utami, F. L. (2020). Pengaruh Opini Audit , Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Jumlah Kasus Korupsi. *Profita : Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 13(2), 255–264. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/profita/article/view/profita.v13i2.008>
- W, R. S. A. A., & Probohudono, A. N. (2015). Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidapatuhan dan Kerugian Negara. *INTEGRITAS Jurnal Anti Korupsi*, 1(1), 81–110.
- Warkini, Bawono, I. R., & Restianto, Y. E. (2021). Pengaruh opini audit, sistem pengendalian intern pemerintah dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kasus korupsi di daerah. *Akuntansi Dewantara*, 4(2), 113–127.